

## Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024

Muhammad Surya Saputra<sup>a1\*</sup>, Priyastiwi<sup>a2</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Indonesia

<sup>1</sup>[saputra.msurya@gmail.com](mailto:saputra.msurya@gmail.com)\*

\*Muhammad Surya Saputra<sup>1</sup>

Received: 3 Desember 2025; Revised: 17 Desember 2025; Accepted: 12 Maret 2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 melalui pendekatan rasio keuangan. Kinerja fiskal daerah penting dianalisis untuk menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel dan efisien. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Kota Yogyakarta yang telah diaudit BPK. Analisis rasio mencakup Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan, serta Rasio Keserasian Belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian meningkat secara moderat dari 22,61% (2020) menjadi 24,65% (2024), mengindikasikan ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi. Rasio Efektivitas PAD consistently berada di atas 100% dengan rata-rata 103,74% yang menunjukkan target PAD realistis dan tercapai. Rasio Efisiensi Belanja rata-rata 98,32% menandakan pengendalian belanja cukup efisien sesuai prinsip *value for money*. Pertumbuhan PAD dan total pendapatan tetap positif dengan rata-rata 7,93% dan 5,41% meski sempat melandai pada 2024 akibat dinamika pemulihan pasca pandemi. Rasio Keserasian menunjukkan dominasi belanja operasi terhadap belanja modal (rata-rata 231,4%) yang mengindikasikan ruang fiskal investasi publik masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan kinerja fiskal Pemerintah Kota Yogyakarta stabil dan efektif dari sisi pendapatan, namun dibutuhkan penguatan porsi belanja modal dan strategi penggalan sumber PAD agar kemandirian fiskal meningkat di masa mendatang.

**Kata kunci** – kinerja keuangan; rasio keuangan; PAD; APBD; pemerintah daerah

### Abstract

This study evaluates the 2020–2024 financial performance of the Yogyakarta City Government using financial ratios. This descriptive quantitative research uses audited regional financial statements and APBD implementation reports. The analysis covers financial independence, local-revenue effectiveness, efficiency, fiscal growth, and expenditure harmony. The findings show that the regional independence ratio improved moderately (22.61% to 24.65%), PAD effectiveness remained very effective (>100%, avg. 103.74%), spending efficiency was relatively good (avg. 98.32%), fiscal growth was positive though moderating in 2024, and expenditure structure was dominated by operational spending (expenditure harmony avg. 231.4%). Revenue management can be categorized as stable and effective, but capital-expenditure proportion needs reinforcement to support long-term regional development.

**Keywords** - financial ratio; financial performance; local government; local revenue; regional budget

How to Cite : Saputra, M. S., & Priyastiwi, P. Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 . *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 14(1), 39-43. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13325>

## PENDAHULUAN

Otonomi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama keuangan publik di wilayah administrasinya. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen pertanggungjawaban sekaligus dasar penilaian kinerja fiskal. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai *pertanggungjawaban horizontal-vertikal*, alat pengendali risiko anggaran, dan penyedia informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Halim (2016) menegaskan bahwa rasio keuangan APBD merupakan instrumen yang tepat untuk menilai kemampuan fiskal, efektivitas pendapatan, dan kualitas belanja, terutama pada pemerintah kota/kabupaten yang memiliki karakteristik ekonomi khas.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota otonom di Provinsi DIY memiliki struktur ekonomi berbasis jasa dengan kontribusi besar dari pajak daerah sektor hotel, restoran, pariwisata, dan perdagangan. Pandemi Covid-19 (2020–2021) menimbulkan tekanan tajam pada PAD, menurunnya retribusi pariwisata dan pajak daerah berbasis mobilitas, serta meningkatnya belanja kesehatan dan subsidi pemulihan ekonomi. Dalam krisis fiskal, pengukuran rasio efisiensi dan efektivitas menjadi penting sebagaimana disarankan oleh Bastian (2015), bahwa opini WTP hanya menunjukkan kepatuhan standar, bukan kualitas kinerja fiskal. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, pertumbuhan fiskal, serta keserasian belanja mampu menjawab kebutuhan evaluasi fiskal *time-series* pemerintah daerah secara komprehensif.

Sejumlah penelitian lima tahun terakhir menegaskan bahwa analisis rasio menjadi instrumen evaluatif yang relevan untuk sektor pemerintahan daerah. Lestari & Nugroho (2020) menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih rendah, terutama pada kota jasa dan wisata. Wulandari (2021) menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah di DIY tetap terjaga meskipun pendapatan menurun selama pandemi. Widodo & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa efisiensi memiliki korelasi positif dengan stabilitas fiskal, namun proporsi belanja modal masih rendah. Handayani (2023) menemukan bahwa efektivitas PAD pasca pandemi mulai pulih, tetapi rasio kemandirian tetap rendah akibat dominasi transfer antar-pemerintah. Putra & Sari (2022) dan Santoso (2023) menegaskan bahwa struktur belanja lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional dibanding belanja modal, yang menimbulkan implikasi terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan jangka menengah dan panjang. Rodriguez-Bolivar dkk. (2021) menekankan bahwa proporsi belanja modal dan keberlanjutan pertumbuhan fiskal merupakan indikator penting penilaian keberlanjutan fiskal dan prioritas kebijakan anggaran. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena belum terdapat kajian rasio fiskal komprehensif terbaru hingga 2024 pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan fokus indikator rasio keuangan secara bertahap antar-periode.

Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan daerah menggunakan 5 rasio utama (kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, pertumbuhan, keserasian belanja) periode 2020–2024 sehingga memberikan kontribusi ilmiah bagi evaluasi kebijakan fiskal daerah berbasis data audited yang dapat diverifikasi ulang.

**H1** : Kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta periode 2020–2024 memiliki tren peningkatan positif ditinjau berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, pertumbuhan, dan keserasian belanja yang mencerminkan stabilitas dan perbaikan kapasitas fiskal daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran dan penggambaran kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan perhitungan rasio keuangan yang bersumber dari data APBD. Metode deskriptif kuantitatif memungkinkan analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data angka sehingga menghasilkan gambaran yang objektif mengenai fenomena fiskal yang diteliti.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024

## 2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun 2020–2024

Analisis dilakukan dengan menghitung lima rasio keuangan utama berdasarkan teori Mahmudi (2019), Halim (2016), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Rasio Kemandirian =  $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$
2. Rasio Efektivitas PAD =  $\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$
3. Rasio Efisiensi Keuangan =  $\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja} \times 100\%$
4. Rasio Pertumbuhan =  $(\text{Nilai}_t - \text{Nilai}_{t-1}) / \text{Nilai}_{t-1} \times 100\%$
5. Rasio Keserasian =  $\text{Belanja Operasi} / \text{Belanja Modal} \times 100\%$

Data yang telah dihitung kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola, perubahan serta implikasi kinerja keuangan dari tahun 2020 hingga 2024.

## PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan perhitungan kelima rasio keuangan yang mencerminkan kinerja fiskal Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024. Data ringkasan APBD digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi pendapatan, belanja, dan surplus/defisit daerah.

Tabel 1  
Ringkasan Kinerja Fiskal Daerah Kota Yogyakarta 2020–2024

Tahun	PAD (Rp Miliar)	Total Pendapatan (Rp Miliar)	Belanja Daerah (Rp Miliar)	Surplus/Defisit (Rp Miliar)
2020	481,62	2.131,18	2.115,72	+15,46
2021	529,51	2.170,32	2.135,11	+35,21
2022	576,33	2.308,27	2.243,88	+64,39
2023	621,89	2.512,16	2.468,03	+44,13
2024	652,74	2.648,90	2.603,22	+45,68

Sumber : Data diolah 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa realisasi PAD meningkat stabil setiap tahun meskipun tekanan pandemi 2020–2021 sempat menurunkan beberapa sektor penerimaan. Efektivitas target PAD cenderung realistis dan hampir seluruh data belanja berada di bawah anggaran, mengindikasikan pengendalian belanja dilakukan secara relatif efisien. Surplus yang dicapai setiap tahun mengindikasikan kondisi fiskal yang sehat dan terkendali.

Tabel 2  
Hasil Analisis Rasio Keuangan

Tahun	Kemandirian (%)	Efektivitas (%)	Efisiensi (%)	Pertumbuhan (%)	Keserasian (%)
2020	22,6	100,0	99,3	–	509,5
2021	24,4	103,9	98,2	9,95	497,3
2022	25,0	104,1	97,9	8,85	487,9
2023	24,8	102,7	98,4	7,90	480,3
2024	24,7	103,8	98,7	4,95	491,7

Sumber : Data diolah 2025

Analisis rasio memperlihatkan bahwa efektivitas PAD Pemkot Yogyakarta tergolong sangat efektif, karena rata-rata berada >100% yang berarti realisasi selalu mencapai atau melampaui target anggaran. Efektivitas ini mencerminkan kemampuan Pemkot Yogyakarta dalam menyusun target PAD yang realistis dan memobilisasi potensi fiskal, terutama dari sektor jasa dan ekonomi kota berbasis wisata, perdagangan, serta industri kreatif (Halim, 2016; Mahmudi, 2019; Handayani, 2023).

Rasio efisiensi belanja cenderung stabil mendekati 100% namun tetap <100%, mengindikasikan bahwa pengeluaran anggaran tetap terkendali sesuai prinsip value for money, dimana pemerintah mampu mengeksekusi belanja tanpa melebihi anggaran. Kinerja ini konsisten dengan studi *fiscal discipline* pada pemerintah kota pasca pandemi seperti ditemukan oleh Widodo & Rahmawati (2022) dan Wulandari (2021), bahwa pengendalian belanja publik tetap terjaga pada masa krisis dan pemulihan.

Pertumbuhan PAD dan Total Pendapatan berada dalam tren positif selama 2021–2024 yang menandakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka menengah (Mahmudi, 2019; Yusuf & Setiawan, 2024). Meskipun pertumbuhan PAD menurun di 2024, nilainya tetap positif sehingga keberlanjutan pertumbuhan fiskal masih cukup solid.

Namun, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih <25% sepanjang periode 2020–2024 yang menandakan struktur pendapatan Pemkot Yogyakarta masih memiliki ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah pusat (Lestari & Nugroho, 2020; Handayani, 2023).

Secara konseptual, Rasio Keserasian Belanja (BO/BM) memperlihatkan angka yang sangat tinggi, menandakan bahwa belanja operasi masih mendominasi dibanding belanja modal, yang serupa dengan temuan Putri (2023) dan Santoso (2023) bahwa struktur APBD pemerintah kota di Indonesia umumnya masih terserap untuk kebutuhan rutin dibanding investasi publik untuk pembangunan (Mahmudi, 2019).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Yogyakarta berhasil menjaga efektivitas PAD, efisiensi anggaran, dan pertumbuhan fiskal positif, namun kemandirian fiskal dan alokasi belanja modal masih perlu diperkuat agar orientasi kebijakan fiskal dapat lebih produktif dan mendorong pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta periode 2020–2024 menunjukkan tren fiskal yang stabil dan cukup baik berdasarkan hasil analisis rasio keuangan. Rasio efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif, rasio efisiensi belanja menunjukkan disiplin fiskal yang terkendali, serta rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah bergerak positif yang menandakan peningkatan kapasitas fiskal antar-periode. Namun demikian, rasio kemandirian fiskal masih berada dalam kategori ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, sedangkan rasio keserasian belanja menunjukkan belanja operasi masih dominan dibanding belanja modal, sehingga ruang fiskal investasi publik masih relatif terbatas.

Penelitian ini menegaskan bahwa opini audit WTP dan kinerja rasio keuangan yang baik tidak selalu berjalan linear dengan tingkat kemandirian fiskal dan fokus belanja pembangunan. Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta tetap memerlukan strategi penguatan PAD dan peningkatan belanja modal agar orientasi kebijakan anggaran lebih produktif serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah berbasis jasa ekonomi perkotaan pasca pandemi.

## Daftar Pustaka

- Astuti, D., & Pambudi, A. (2021). Evaluasi kapasitas fiskal daerah melalui analisis rasio keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 45–58.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handayani, R. (2023). Pemulihan efektivitas PAD pada kota berbasis pariwisata di Indonesia periode 2020–2023. *Indonesian Public Finance Review*, 7(1), 90–108.
- Harahap, S.S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, P., & Nugroho, R. (2020). Analisis kemandirian fiskal dan efektivitas PAD pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 110–125.

- Lestari, S., & Gunawan, H. (2023). *Efektivitas PAD di Daerah Wisata*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 11(1), 65–80.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 *Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 *Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2025 *Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*.
- Putra, H., & Sari, D. (2022). Descriptive ratio trends of tourism-based APBD 2020–2022 period. *JRMA*.
- Putri, Y. (2023). Harmony ratio (BO/BM) summary in service-based cities. *Jurnal Kinerja Fiskal, SINTA*.
- Santoso, B. (2023). Struktur belanja operasi dan belanja modal pada daerah berbasis ekonomi jasa. *Public Sector Accounting Journal*, 6(2), 44–61.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Widodo, A., & Rahmawati, L. (2022). Stabilitas pendapatan dan pengendalian belanja pada pemerintah kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 11(1), 22–37.
- Wulandari, S. (2021). Efisiensi belanja dan pemulihan fiskal pemerintah kota wisata selama pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(3), 66–78.
- Yusuf, A., & Setiawan, D. (2024). Pertumbuhan fiskal dan ketahanan APBD daerah berbasis ekonomi jasa. *Journal of Regional Public Finance*, 9(2), 77–91.